

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Abdul Halim, dkk.. 2014. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali. Jakarta Pers.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Andi Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, dan Altje Agustin Musa. 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Pajak*. PT Remaja Rodakarya. Bandung.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hadi Irawan. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Bayu Media. Malang.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pi dana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet. Ke-2. Sinar Grafika. Jakarta.

- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. PT. Hanindita Offset. Yogyakarta.
- Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Bina Aksara. Jakarta.
- Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana edisi 2*. Usu Press. Medan.
- Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Rajawali Pers. Depok.
- \_\_\_\_\_ dan Eka Merdekawati Djafar. 2011. *Kejahatan Dibidang Perpajakan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. Ke-V. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mulyo Agung. 2007. *Perpajakan Edisi revisi*. BPFE. Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- R. Tresna. 1990. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Cet. Ke-3. PT. Tiara. Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Said Sampara dan Insan Anshari. 2012. *Tindak Pidana Perpajakan*. BP Cipta Karya. Jakarta.
- Salim. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Edisi Kedua)*. PT.Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum cetakan ketiga*. UI Press. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.

Syahruddin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT. Umitoh Ukhuwah Grafika. Makassar.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo persada. Jakarta.

Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Djambatan. Jakarta.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan Indonesia edisi 10*. Salemba Empat. Jakarta.

Wiryono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

#### **Jurnal:**

Fioren Keintjem. 2021. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*. Vol. IX. No. 5.

Lamijan. 2014. "Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Ekonomi Bidang Mafia Dan Korupsi Perpajakan)". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 1. No. 1.

La Gursi. 2017. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang". *Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol. 7. No. 2.

Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, dan Bondan Catur Kurniawan. 2014. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

(Studi Pada Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)". Jurnal Perpajakan. Vol. 3. No. 1.

**Berita:**

Kompas, "*Palsukan Faktur Pajak, Wajib Pajak Ini Divonis Penjara dan Denda Rp 20,5 Miliar*", diakses di <https://money.kompas.com/read/2020/08/07/114100226/palsukan-faktur-pajak-wajib-pajak-ini-divonis-penjara-dan-denda-rp-20-5-miliar?page=all> pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 16:00 WITA.